

Pengaruh Penyaluran Krabat Terhadap Pendapatan Petani Miskin

M. Aries Zukhri Angkasa¹, Jhon Kenedi²

1. *Agribisnis, Universitas Samawa*
2. *Pendidikan Ekonomi, Universitas Samawa*

Email:

abufayza2011@gmail.com

jhonkenedi92@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak penyaluran Kredit Sahabat terhadap pendapatan petani miskin serta mengidentifikasi bagaimanakah kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penyaluran Kredit Sahabat. Metode yang digunakan dalam ini penelitian dengan metode kebijakan serta pendekatan gabungan (mix method) kualitatif dan kuantitatif. Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian survey. Penelitian ini dilaksanakan di 10 kecamatan. Penentuan desa sampel pada penelitian ini adalah dengan metode Purposive Sampling. Sampel ditentukan dengan terlebih dahulu memilih desa secara sengaja, lalu menentukan responden dengan metode Accidental Sampling. Penentuan Desa sampel dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan keberadaan Bumdes dan keterwakilan wilayah (timur, barat, tengah dan selatan). Dengan jumlah 28 desa/bumdes yang akan menjadi obyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, observasi dan Focus Group Discussion. Analisis data dilakukan dengan Metode Deskriptif dan Metode Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan dari 28 Bumdes yang menjadi obyek penelitian ini, sebagian besar (75%) Bumdes yang menjadi contoh dalam penelitian ini didirikan setelah Program Kredit Sahabat mulai diberlakukan. 57% Bumdes menyebutkan bahwa Kredit Sahabat telah menjangkau seluruh petani miskin yang berada di desanya, 18% Bumdes menyatakan telah menjangkau sebagian petani miskin dan sisanya (25%) menyebutkan bahwa kredit sahabat belum menjangkau petani miskin yang ada di desanya. Dari analisis regresi dan uji asumsi klasik di atas menunjukkan bahwa kredit sahabat (krabat) baik secara parsial maupun bersama-sama mempengaruhi pendapatan petani. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa secara umum penyaluran kredit sahabat mendorong peningkatan pendapatan petani.

Kata kunci: *Kredit Sahabat, Pendapatan dan Petani Miskin*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah makroekonomi yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Sehingga agenda pertama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) 2030 yang dicanangkan oleh PBB adalah pengentasan seluruh bentuk kemiskinan di semua tempat. Angka kemiskinan di Indonesia cenderung menurun baik di kota maupun di pedesaan. Tingkat kemiskinan tahun 2012 di kota

adalah 8,7% dan di pedesaan 15,2%. Angka tersebut menurun pada tahun 2018, yakni 7,02% di kota dan 13,2% di pedesaan. Namun kemiskinan di pedesaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan di kota walaupun arus urbanisasi semakin meningkat. Jumlah orang miskin di pedesaan masih rata-rata dua kali lebih banyak dibandingkan di kota (BPS, 2018). Kemiskinan di pedesaan disebabkan rendahnya produktivitas petani pada sawah yang mengandalkan produksi berbasis lahan. Produktivitas yang rendah disebabkan oleh luas lahan dan permodalan. Minimnya akses petani ke sumber permodalan mengharuskan petani terjerat rentenir dan tengkulak. Besarnya pengembalian ke rentenir menyebabkan berkurangnya pendapatan secara signifikan.

Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Sumbawa melahirkan Program Desa Bebas Rentenir dengan menggelontorkan Dana Kredit sahabat (Krabat). Dana Kredit sahabat mulai disalurkan pada awal tahun 2017 senilai Rp 15 Milyar untuk 75 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Dana Kredit sahabat dialokasikan dalam Bantuan Keuangan Khusus di APBD dan ditransfer ke desa, lalu disalurkan oleh Pemerintah Desa melalui Bumdes. Adapun penyaluran Dana KREDIT SAHABAT tahun 2018 adalah sebesar Rp 5 Milyar untuk 26 desa. Dan pada tahun 2019 sebesar Rp 5 M untuk 25 desa. Sekitar 7.000 petani yang mendapatkan Kredit sahabat yang tersebar pada 101 desa dan 10 kecamatan. Bahkan Bupati Sumbawa menyatakan 7.000 petani miskin yang terbebas dari jeratan rentenir.

Dalam pelaksanaannya, penyaluran dana KREDIT SAHABAT menghadapi kendala dan hambatan, antara lain; lemahnya data jumlah petani miskin yang tercantum pada BDT (basis data terpadu), plafond yang relatif kecil, pengelola yg belum profesional, belum sinkronnya jadwal penyaluran dengan waktu kebutuhan petani, masih dominannya pengaruh elit desa dalam pengelolaan KREDIT SAHABAT. Hambatan dan kendala tersebut menyebabkan harapan untuk membebaskan petani miskin dari jeratan rentenir semakin sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana dampak penyaluran Kredit sahabat terhadap pendapatan petani miskin serta mengidentifikasi dan menganalisis kendala dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam penyaluran Kredit sahabat.

KAJIAN PUSTAKA

Petani dan Kemiskinan

Eric R Wolf (1985) memberikan definisi tentang petani pedesaan sebagai orang yang bercocok tanam di daerah pedesaan yang mengelola dalam skala rumah tangga. Petani pedesaan merupakan bagian dari masyarakat yang lebih besar dan lebih kompleks. Para petani tidak hanya harus menyediakan bagi diri mereka sendiri jumlah kalori minimum, tetapi harus juga menghasilkan pangan yang cukup banyak di atas jumlah kalori yang minimum untuk memperoleh benih yang cukup untuk tanaman berikutnya, atau untuk memperoleh makanan yang cukup bagi ternak mereka.

Namun pertanian saat ini tidak lagi bercorak subsisten tetapi diwarnai dengan pembentukan usaha tani modern. Usaha tani modern ditandai dengan penerapan inovasi dan teknologi pertanian. Usaha tani modern telah menggeser situasi

kehidupan petani dari kondisi merdeka untuk memanfaatkan hasil pertaniannya ke kondisi dimana petani bergantung pada berbagai unsur yang berada di luar dirinya. Buruh tani bergantung pada majikannya, pemasaran produksi pertanian berada di bawah hukum permintaan dan penawaran pasar, bahkan harga jual produk pertanian selalu terancam oleh rekayasa praktek ekonomi makro (Soetomo, 1997).

Sesudah terguncang akibat terpaan badai krisis ekonomi, sosial, dan politik pada akhir 1990-an, Indonesia kini mulai kembali bangkit. Negara ini sebagian besar telah pulih dari krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi pada tahun 1998, yang telah melemparkan jutaan penduduknya ke jurang kemiskinan dan menjadikannya sebagai negara berpenghasilan rendah. Namun, belumlah ini Indonesia sekali lagi berhasil melewati ambang batas kemiskinan dan menjadi salah satu negara berpenghasilan menengah di dunia.

Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia – sebuah bangsa berkepulauan yang mencakup lebih dari 300 suku – telah memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik sejak krisis finansial Asia di akhir 1990an. PDB Indonesia nasional terus meningkat, dari \$857 pada tahun 2000 menjadi \$3.847 pada 2017. Saat ini Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan ekonomi terbesar kesepuluh berdasarkan paritas daya beli, dan merupakan anggota G-20. Indonesia telah berhasil mengurangi kemiskinan lebih dari setengahnya sejak tahun 1999, menjadi 9,8% pada tahun 2018.

Hingga hari ini, sebagian besar petani di Indonesia yang berjumlah 26 juta rumah tangga, masih hidup di bawah garis kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa tahun 2016 lalu sebesar 14 persen penduduk miskin berada di wilayah pedesaan yang sebagian besar mengandalkan ekonominya dari sektor pertanian. Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebutkan bahwa rendahnya kepemilikan lahan adalah salah satu penyebab para petani tak pernah bisa hidup makmur.

Hingga saat ini para petani di Indonesia rata-rata hanya memiliki lahan kurang dari setengah hektar. Terutama para petani di Pulau Jawa. “Kondisi ini menyebabkan petani sulit untuk mengusahakan lahan itu sendiri pada tingkat yang menguntungkan,” kata Bambang. Masalah lainnya adalah karena sebagian besar petani belum memiliki ketrampilan pertanian yang mumpuni. Sebabnya, karena sebagian besar petani berpendidikan rendah. Keterbatasan keterampilan, pendapatan yang rendah dan pendidikan yang kurang memadai itu membuat para petani kesulitan mengadopsi teknologi pertanian yang baru. Padahal perkembangan dunia pertanian sekarang ini sangat tergantung dengan penguasaan teknologi.

Urgensi Modal dalam Usaha Tani

Permodalan adalah permasalahan paling mendasar yang sering dihadapi petani. Modal sering menjadi kendala seorang petani dalam melakukan usahatani. Keterbatasan modal juga membuat kuantitas dan kualitas hasil yang didapat petani tidak maksimal. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2016, menyatakan bahwa hanya 15% petani yang mengakses kredit di bank. Terdapat permasalahan kredit melalui perbankan yang dirasakan petani, seperti prosedur yang

birokratis, tinggi risiko, dan besarnya suku bunga. Sedangkan jika petani memilih untuk melakukan kredit ke lembaga non bank atau informal tentu akan lebih merugikan karena tingkat suku bunga yang sangat tinggi. Berbagai kondisi tersebut tentu sangat memberatkan petani dan bisa menjadi permasalahan baru untuk mendapatkan modal.

Petani membutuhkan akses permodalan yang mudah dan cepat. Petani umumnya hanya memiliki penghasilan setelah masa panen. Jika lahan petani mengalami cuaca ekstrem maupun serangan hama dan penyakit sehingga gagal panen, harus ada langkah yang cepat agar petani mendapatkan modal kembali untuk memulai usahanya maupun memulihkan kondisi lahannya. Modal yang dibutuhkan tidak selalu berjumlah besar, namun yang terpenting adalah harus didapatkan secara mudah dan cepat.

Soekartawi (2001) menyebutkan bahwa tingkat produksi ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain; jenis komoditi, luas lahan, tenaga kerja, modal, manajemen, iklim dan faktor sosial ekonomi produsen. Faktor – faktor tersebut disebut faktor produksi. Di berbagai literatur, faktor produksi ini dikenal dengan istilah input production factor dan korbanan produksi. Dalam berbagai pengalaman menunjukkan bahwa faktor lahan, modal, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja dan aspek manajemen adalah faktor produksi yang terpenting dibanding faktor produksi lainnya. Hubungan antara faktor produksi (input) dan produksi (ouput) biasanya disebut dengan fungsi produksi atau disebut juga factor relationship.

Dalam sejarahnya, kehadiran lembaga keuangan informal (rentenir) memang sudah tumbuh menjamur berdampingan dengan lembaga keuangan formal. Tidak ada secara jelasnya kapan pertama kalinya rentenir ini mulai tumbuh di Indonesia. Namun perkembangan lembaga ini jelas terlihat dan biasanya subur dan menyatu dengan perekonomian masyarakat kelas bawah terutama wilayah pedesaan. Modal yang dipaksakan dengan meminjam kepada rentenir memberi dampak negatif kepada masyarakat. Semua itu disebabkan oleh besarnya bunga 4 yang diberikan.

Konsep Kredit dan Kredit Sahabat

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa “kredit adalah penyediaan uang tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Menurut Siamat (1999), kredit digolongkan ke dalam 6 (enam) bentuk yaitu: 1) Penggolongan kredit berdasarkan jangka waktu (maturity), antara lain: a. Kredit jangka pendek (*short-term loan*), b) Kredit jangka menengah (*medium-term loan*), c) Kredit jangka panjang (*long-term loan*), 2) Penggolongan kredit berdasarkan barang jaminan (collateral), antara lain: a) Kredit dengan jaminan (*secured loan*), c) Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*), 3) Kredit berdasarkan segmen usaha, seperti otomotif, farmasi, tekstil, makanan, konstruksidan sebagainya, 4) Penggolongan kredit berdasarkan tujuannya, antara lain: a) Kredit komersil (*commercial loan*), yaitu kredit

yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan, b) Kredit konsumtif (*consumer loan*), yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif, c) Kredit produktif (*productive loan*), yaitu kredit yang diberikan dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi, 5) Penggolongan kredit menurut penggunaannya, antara lain: a) Kredit modal kerja (*working capital credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh Bank untuk menambah modal kerja debitur, b) Kredit investasi (*investment credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh Bank kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal serta 6) Kredit non kas (*non cash loan*), yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang hanya boleh ditarik apabila suatu transaksi yang telah diperjanjikan telah direalisasikan atau efektif.

Salah satu program strategis dari Pemerintahan Husni Jibril – Mahmud Abdullah yang tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021 adalah Program Desa bebas Rentenir. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam mengelola potensi desanya. Program Desa Bebas Rentenir diimplementasikan dalam bentuk kredit kepada petani miskin yang disebut Kredit sahabat atau disingkat Kredit Sahabat. Program ini dimulai sejak awal 2017 dimana Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengalokasikan dana sebesar Rp 15 Milyar dalam Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada 75 pemerintah desa yang selanjutnya akan ditransfer kepada petani miskin melalui BUM Desa masing-masing.

Pengelolaan Dana Kredit Sahabat diatur dalam Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit sahabat bagi petani miskin melalui BUM Desa dalam rangka implementasi Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa. Dana Kredit Sahabat bersumber dari APBD dan dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Alokasi Dana Kredit Sahabat pada APBDes dalam bentuk Penyertaan Modal kepada BUM Desa. Pemerintah Desa akan menerima dividen dan wajib mengalokasikan 50% nya untuk penyertaan modal kepada BUM Desa.

Petani yang menjadi sasaran Dana Kredit sahabat adalah petani yang namanya tercantum dalam basis data terpadu (BDT) – TNP2K. Dalam hal terjadi perbedaan antara basis data terpadu dengan kenyataan, maka dilakukan penyesuaian daftar penerima Kredit Sahabat diputuskan dalam Musyawarah Desa. Adapun kriteria penerima Kredit Sahabat dan persyaratan administrasi diatur dalam SOP Bumdes. Lalu penerima Kredit Sahabat harus memiliki jaminan. Dana Kredit Sahabat diberikan secara tunai dengan kewajiban membayar biaya 8 % yang terdiri dari biaya provisi, administrasi dan kolektif.

Kredit Sahabat pada akhirnya dihajatkan untuk mengurangi angka kemiskinan khususnya kemiskinan di pedesaan. Keberadaan kredit sahabat tentunya akan meningkatkan akses modal petani. Sehingga ketergantungan petani terhadap modal dari rentenir bisa dikurangi bahkan dihilangkan sama sekali. Dana khabat nantinya akan terus bergulir untuk membantu petani dalam usaha taninya. Semakin banyak

petani yang dapat dibebaskan dari rentenir sampai kemudian tidak adalah praktek rentenir di desa tersebut.

METODE

Secara umum penelitian ini menggunakan metode penelitian kebijakan dengan pendekatan metode gabungan (*mix method*) kualitatif dan kuantitatif. Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian survei. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yang terkait dengan implementasi kebijakan strategis Kabupaten Sumbawa, yakni Program Kredit sahabat bagi Petani Miskin.

Teknik Sampling

Penelitian ini dilaksanakan di 10 kecamatan yang desanya mendapatkan Dana Kredit sahabat tahun 2017. Penentuan desa sampel pada penelitian ini adalah dengan metode *Purposive Sampling*. Sampel ditentukan dengan terlebih dahulu memilih desa secara sengaja, lalu menentukan responden dengan metode *Accidental Sampling*. Responden utama pada penelitian ini adalah petani penerima Kredit sahabat. Informasi lain juga yang akan dikumpulkan dari sumber data lainnya, seperti: Manajer Bumdes, Tim Teknis Manajemen (TTM), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, dan Bagian Ekonomi Setda Sumbawa. Adapun ukuran sampling ditentukan dengan menggunakan pendapat Roscoe dalam Sugiyono (2017) yang menyatakan bahwa penelitian yang menggunakan teknik analisis multivariat (regresi atau korelasi), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti.

Dalam penelitian ini, ada 4 variabel yang akan diteliti, yakni 1 variabel dependen dan 3 variabel independen. Pendapatan petani sebagai variabel dependen, dana krabat, luas lahan, dan modal lain sebagai variabel independen. Jika mengacu kepada pendapat Roscoe di atas, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah minimal 40 sampel atau responden. Penentuan Desa sampel dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan keberadaan Bumdes dan keterwakilan wilayah (timur, barat, tengah dan selatan). Setelah dilakukan pengelompokan berdasarkan pertimbangan di atas, maka diperoleh 28 desa/bumdes yang akan menjadi obyek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, observasi dan *Focus Group Discussion*. Wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung dan menggunakan pedoman wawancara. Adapun dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa dokumen, foto, dan catatan lainnya yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung fenomena yang terjadi selama penelitian. Dan focus group discussion adalah forum untuk klarifikasi hasil penelitian sementara.

Wawancara dilakukan terhadap manajer Bumdes dan petani penerima krabat. Wawancara terhadap manajer Bumdes dilakukan untuk memperoleh informasi dan data tentang mekanisme penentuan penerima krabat, proses penyaluran dan

pengembalian, serta kendala dan hambatan dalam pengelolaan Kredit sahabat. Sedangkan wawancara terhadap petani penerima krabat dilakukan dengan maksud untuk memperoleh informasi tentang mekanisme pencairan krabat, ketepatan waktu penyaluran, pendapatan sebelum dan setelah memperoleh dana krabat, serta pendapat petani terhadap penyaluran dana krabat secara keseluruhan.

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan Metode Deskriptif dan Metode Regresi Linier Berganda. Analisis deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang dampak dana Kredit sahabat terhadap pendapatan dan kehidupan responden. Sedangkan metode Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen (pendapatan petani) dan variabel independen (dana Kredit sahabat, luas lahan, saprodi, modal lainnya). Selain itu, metode regresi juga dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen. Metode ini juga digunakan untuk mengetahui signifikansi dari variabel-variabel tersebut. Metode Regresi Berganda digunakan karena jumlah variabel independen lebih dari satu.

Metode analisis ini dilakukan dengan menggunakan Teknik *Ordinary Least Square* (OLS) dan aplikasi E-Views 9. Model Regresi Berganda dengan 3 (tiga) variabel dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu$$

Dimana :

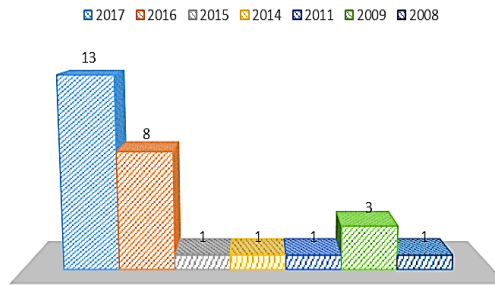
- y = Pendapatan Petani
- β_0 = Intersep
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Paramater
- X_1 = Dana Krabat
- X_2 = Luas Lahan

- X_3 = Modal Lain

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bumdes dan Penyaluran Kredit Sahabat

Dari 28 Bumdes yang menjadi obyek penelitian ini, ada 13 (46%) berdiri tahun 2017, 8 (29%) pada tahun 2016, sisanya (25%) berdiri sebelum tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar (75%) Bumdes yang menjadi contoh dalam penelitian ini didirikan setelah Program Kredit Sahabat mulai diberlakukan.



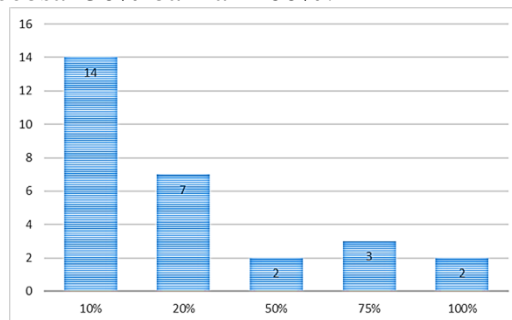
Gambar 2. Jumlah Bumdes berdasarkan Tahun Berdiri

Sebagian (57%) Bumdes menyebutkan bahwa Kredit Sahabat telah menjangkau seluruh petani miskin yang berada di desanya, 18% Bumdes menyatakan telah menjangkau sebagian petani miskin dan sisanya (25%) menyebutkan bahwa kredit sahabat belum menjangkau petani miskin yang ada di desanya.



Gambar 3. Keterjangkauan Kredit Sahabat

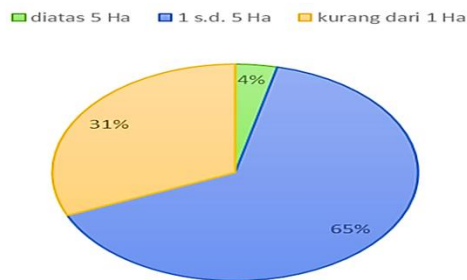
Dalam penyaluran kredit sahabat, pengelola dihadapkan dengan persoalan tunggakan pengembalian oleh penerima krabat. Ada 50% dari Bumdes yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki jumlah tunggakan nasabah krabat sebesar 10%. Lalu ada 25% yang tunggakan nasabahnya sebesar 20%, sisanya memiliki tunggakan nasabah sebesar 50% bahkan 100%.



Gambar 4. Jumlah Bumdes dan Persentase Tunggakan

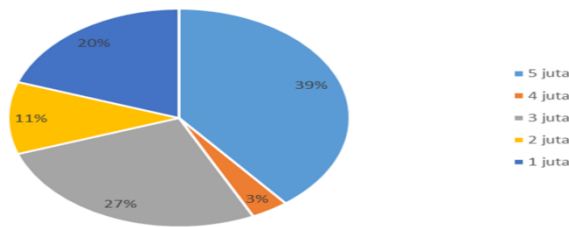
Petani Penerima Kredit Sahabat

Petani Miskin adalah sasaran utama dari penyaluran kredit sahabat. Salah satu indikatornya adalah luas kepemilikan lahan. Dalam penelitian ini luas lahan yang dimiliki petani terdiri dari luas lahan kurang dari 1 ha sejumlah 31%, luas lahan antara 1 Ha sampai dengan 5 Ha sebanyak 65% dan kepemilikan lahan di atas 5 Ha sejumlah 4%. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa penerima dana krabat masih didominasi petani yang memiliki lahan dengan luas antara 1 Ha sampai dengan 5 Ha. Hanya sepertiga (31%) petani penerima dana krabat yang memiliki lahan kurang dari 1 Ha.



Gambar 5. Kepemilikan Lahan Petani Penerima Krabat

Jumlah dana krabat yang diterima petani berkisar Rp 1 juta sampai dengan Rp 5 juta. Petani yang menerima dana sebesar Rp 5 juta sebanyak 39 %. Lalu 27 % dari petani responden menerima Rp 3 juta , 20 % menerima dana sebesar Rp 1 juta . Dan sisanya masing – masing menerima Rp 2 juta (11 %) dan Rp 4 juta (3 %).

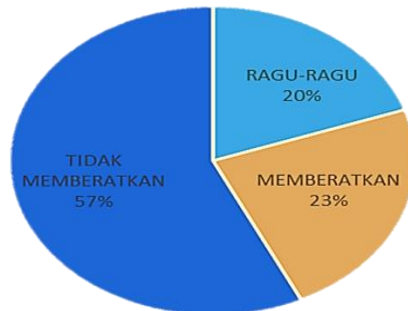


Gambar 6. Jumlah Pinjaman Petani Penerima Krabat

Sebagian besar dana pinjaman krabat sesuai dengan plafon maksimal sebesar 5 juta rupiah. Banyaknya Bumdes yang belum menyalurkan dana krabat dengan platform maksimal disebabkan karena jumlah petani yang ada jauh melebihi jumlah petani yang dapat diakomodir oleh dana krabat.

Kredit sahabat merupakan kredit dengan bunga 0 % atau tanpa bunga. Namun debitur harus membayar dana provisi, biaya administrasi dan kolekting sebesar 8 % dari pinjaman pada saat awal peminjaman. Dana provisi tersebut akan menjadi

dividen yang sebagiannya (50%) dialokasikan untuk tambahan penyertaan modal, lalu sebagian lagi untuk pendapatan asli desa.



Gambar 7. Respon Petani Penerima Krabat terhadap Biaya Provisi

Sekitar 57% dari petani responden menyebutkan bahwa dana provisi tidak memberatkan. Adapun yang menyatakan bahwa dana provisi memberatkan, hanya 23%. Sisanya (20%) menyebutkan ragu-ragu atau tidak menjawab. Petani responden yang menjawab bahwa dana provisi memberatkan memiliki alasan bahwa penarikan dana diawal akan mengurangi jumlah dana untuk pembiayaan usaha tani mereka. Sedangkan petani yang menjawab bahwa dana provisi tidak memberatkan karena nominalnya relatif lebih kecil dibandingkan jika mereka harus meminjam kepada sumber lain.

Kendala dan Hambatan Pengelolaan dan Penyaluran Kredit Sahabat

Hasil survei di 28 (dua puluh delapan) desa menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pengelolaan dan penyaluran kredit sahabat antar alain; lemahnya basis data terpadu, isu krabat adalah hibah, biaya provisi yang memberatkan, belum ada SOP Bumdes tentang kriteria penerima krabat, dan pengelolaan dana krabat yang masih konvensional.

Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2017 menyebutkan bahwa penerima krabat diprioritaskan pada petani miskin yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dari Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan. Ketentuan ini sangat mempersulit Bumdes untuk menetapkan penerima krabat. Nama petani miskin yang termuat dalam data BDT seringkali berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan. Perbedaan nama, domisili dan kondisi ekonomi mengharuskan pemerintah desa dan Bumdes untuk menyesuaikan dalam Musyawarah Desa.

Anggapan bahwa kredit sahabat adalah hibah bagi petani miskin. Kondisi ini menyebabkan tingginya tunggakan kredit sahabat pada beberapa Bumdes. Petani penerima menganggap bahwa uang atau dana yang disalurkan ke mereka adalah uang dari hasil pajak juga. Sehingga mereka merasa bahwa dana krabat pada hakikatnya adalah uang mereka.

Biaya provisi masih dikeluhkan oleh petani penerima karena pemotongan di depan dan jumlahnya melebihi bunga KUR yang jumlahnya 7% per tahun. Jika petani

mengambil kredit sahabat 2 kali setahun maka biaya yang harus dikeluarkan adalah 16 % atau hampir dua kali lipat bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemotongan di depan juga berpengaruh terhadap biaya produksi petani, khususnya petani.

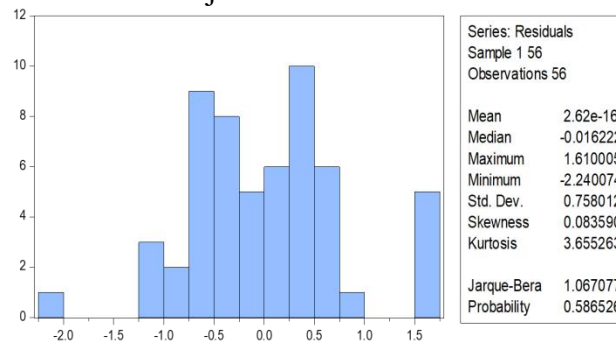
Belum ada kriteria yang tetap terkait petani miskin yang berhak menerima krabat. Bahkan belum ada satupun bumdes yang memiliki SOP kriteria penerima krabat sebagaimana yang diamanatkan Perbup No. 1 Tahun 2017. Standar Operasional Prosedur tersebut penting sebagai rujukan internal Bumdes dalam penyaluran dana krabat. Sehingga tidak penentuan penerima krabat tidak mengacu semata-mata pada basis data terpadu.

Pengelolaan dana krabat yang masih konvensional disebabkan sumberdaya manusia Bumdes yang minim. Sebagian besar Bumdes didirikan atau diaktifkan kembali pada tahun 2016. Hal tersebut akhirnya berpengaruh pada kinerja Bumdes dalam pengelolaan kredit sahabat.

Pengaruh Kredit Sahabat Terhadap Pendapatan Petani

Berdasarkan analisis regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) diperoleh nilai t test untuk Variabel Krabat sebesar 0.0029 yang berarti bahwa Dana Krabat berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan. Lalu nilai F test sebesar 0.000004 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen (Dana Krabat, Luas Lahan, dan Modal lain) secara bersama-sama mempengaruhi pendapatan petani.

Untuk mengetahui normal tidaknya sebaran data maka dilakukan uji normalitas Jarque-Bera. Uji Normalitas tersebut menunjukkan nilai Probability sebesar 0.586 atau lebih dari 0.05. hal ini menunjukkan bahwa sebaran data normal.



Gambar 8. Uji Normalitas Jarque-Bera

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas maka dilakukan Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser Test. Tes ini menunjukkan nilai masing-masing variabel independen (Dana Krabat, Luas Lahan dan Modal lain) lebih besar dari 0.05. hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel independen tidak berpengaruh terhadap absolute residual. Demikian pula dengan nilai Adjusted R-Square yang sangat kecil (0.000425) yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama ketiga variabel independen tidak mempengaruhi absolute residual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut.

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi adalah dengan melihat korelasi antar variabel independennya. Nilai korelasi antar variabel independen menunjukkan nilai 0.194, 0.155, dan 0.613 atau lebih kecil dari 0.8. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam hubungannya ketiganya.

	KRABAT	LUAS_LAHAN	MODAL_LAIN
KRABAT	1.000000	0.193763	0.155050
LUAS_LAHAN	0.193763	1.000000	0.612960
MODAL_LAIN	0.155050	0.612960	1.000000

Dari analisis regresi dan uji asumsi klasik di atas menunjukkan bahwa kredit sahabat (krabat) baik secara parsial maupun bersama-sama mempengaruhi pendapatan petani. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa secara umum penyaluran kredit sahabat mendorong peningkatan pendapatan petani.

Untuk membiayai proses produksinya, sebagian besar petani penerima kredit sahabat sebelumnya meminjam di Bank, Lembaga keuangan, dan rentenir yang memiliki bunga antara 7% sampai dengan 50%. Keberadaan kredit sahabat menjadi penting karena selain menerapkan bunga 0% juga sangat mudah dalam administrasi dan proses pencairan. Dokumen atau sertifikat yang diserahkan sebagai bukti jaminan juga relatif lebih fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan dan perbankan lain.

PEMBAHASAN

Keberadaan Dana Krabat memberikan dampak yang positif terhadap lahir dan berkembangnya Bumdes. Ada yang baru didirikan, ada juga yang dulunya telah kolaps lalu aktif kembali setelah adanya dana krabat. Bumdes yang lahir sebelum tahun 2014 sering disebut Bumdes LKM (lembaga keuangan mikro) yang dananya bersumber dari World Bank, GTZ (*Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit*) dan PNPM Mandiri. Dalam prakteknya Bumdes LKM yang juga mengelola dana krabat memisahkan pembukuan antara Dana Krabat dan Dana yang sebelumnya dikelola oleh Bumdes LKM. Sehingga BUMDes di Kabupaten Sumbawa dibagi pada beberapa kriteria yaitu: maju, berkembang, sedang berkembang serta baru didirikan.

Selain dana krabat, Bumdes juga didukung oleh Pemerintah Desa dengan Penyertaan Modal setiap tahunnya. Penyertaan modal dari desa sebesar Rp 20 juta – Rp 50 juta per tahun. Suntikan dana dari pemerintah desa sebagian besar disalurkan bagi warga desa untuk modal usaha di luar pertanian. Penyertaan modal dilakukan sebagai syarat untuk menerima Kredit Sahabat. Karena BUMDes akan memerlukan kebutuhan-kebutuhan operasional pada saat realisasi Kredit Sahabat.

Masih ada petani miskin yang belum dijangkau oleh Kredit Sahabat. Belum terjangkaunya petani miskin tersebut disebabkan oleh lemahnya data BDT yang menjadi acuan utama dalam penyaluran kredit sahabat. Juga bisa terjadi karena kehati-hatian Bumdes dalam menyalurkan Kredit sahabat yang mempertimbangkan kemampuan pengembalian. Selain itu, jumlah dana yang diterima oleh BUMDes melalui program Kredit Sahabat tidak sesuai dengan jumlah data BDT di setiap desa.

Dalam pelaksanaan Program Krabat, ditemukan masih ada nasabah yang mengalami tunggakan. Berbagai upaya dilakukan oleh manajer Bumdes untuk mengatasi persoalan tunggakan tersebut. Manajer melakukan penagihan secara langsung dengan mendatangi nasabah yang menunggak. Lalu manajer memberitahukan nasabah tentang denda dan sanksi yang diterima jika nasabah menunggak pengembalian krabat. Ada juga manajer bumdes yang memberikan perpanjangan waktu dengan asumsi bahwa nasabah kembali meminjam untuk musim tanam berikutnya.

Selain dana krabat, petani juga pernah dan sedang menerima pinjaman dari sumber lain. Adapun sumber lain tersebut antara lain; Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank negara Indonesia (BNI), Koperasi, Bank Samawa Kencana (BSK), dan Rentenir. Untuk petani penerima krabat yang memiliki lahan kurang dari 1 hektar, keberadaan dana krabat sangat membantu kelangsungan usaha taninya. Jika sebelumnya meminjam di rentenir, atau sumber lainnya, setelah menjadi penerima krabat, mereka tidak lagi memiliki sumber pinjaman lain. Sedangkan petani yang lahannya di atas 1 hektar, mereka tetap menjadi debitur pada lembaga keuangan atau perbankan lain walaupun telah menjadi penerima krabat.

Keberadaan Krabat berpengaruh terhadap pendapatan petani. Hal tersebut dapat disebabkan oleh peningkatan pendapatan petani yang memiliki luas lahan kurang dari 1 Ha karena bunga 0 % yang diterapkan untuk kredit sahabat. Hal ini menunjukkan bahwa petani yang selama ini meminjam dari lembaga keuangan yang menerapkan kredit dengan bunga, memiliki pendapatan yang lebih setelah menjadi penerima dana krabat. Namun untuk petani yang lahannya lebih dari 1 hektar, dapat memanfaatkan dana krabat untuk meningkatkan areal tanam sehingga dana krabat akan mendorong pendapatan yang lebih tinggi.

KESIMPULAN

1. Secara umum Kredit Sahabat berpengaruh terhadap pendapatan petani. Terutama petani dengan kepemilikan lahan kurang dari 1 Ha dan tidak memiliki sumber pinjaman lain selain Krabat.
2. Masih ada petani yang meminjam kepada lembaga keuangan dan perbankan, juga kepada perorangan (rentenir). Secara bertahap keberadaan Krabat turut mengurangi ketergantungan petani kepada rentenir.
3. Bumdes tidak hanya menyalurkan Krabat kepada Petani Miskin tapi juga petani yang memiliki lahan di atas 1 Ha, dengan pertimbangan kemampuan pengembalian dana.

REKOMENDASI

1. Pemerintah Daerah perlu memperbaharui data Calon Penerima Kredit Sahabat, khususnya kriteria dan persyaratan. Untuk itu diperlukan baseline data petani miskin di Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah harus mereview Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Krabat khususnya tentang batas tingkat pengembalian Dana Krabat sebesar 95%. Hal ini penting agar Bumdes fokus pada tujuan utama untuk membebaskan petani dari rentenir.

3. Pemerintah Daerah mesti melakukan pendekatan dan intervensi lain (selain Kredit Sahabat) untuk mewujudkan Desa Bebas Rentenir.

DAFTAR RUJUKAN

- Ariefianto, M.D. 2012. *Ekonometrika* (Esensi dan Aplikasi dengan menggunakan Eviews). Erlangga. Jakarta.
- Asian Development Bank. 2019. *Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020-2045*. Asian Development Bank. Manila.
- Bank Dunia, 2007, *Era baru dalam Pengentasan kemiskinan di Indonesia*, Jakarta.
- Gujarati, D. and Dawn C. Porter.2015. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Edisi 5.Salemba Empat. Jakarta.
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4138252/ini-data-kemiskinan-di-perkotaan-dan-pedesaan/>
- <https://www.samawarea.com/Bupati-kredit-sahabat-bebaskan-7000-petani-miskin-dari-rentenir/>
- Kabupaten Sumbawa. 2017. *Peraturan Bupati Sumbawa No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Sahabat bagi Petani Miskin melalui Badan Usaha Milik desa dalam rangka Implementasi Program Desa Bebas Rentenir di Kabupaten Sumbawa*. Sumbawa Besar.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN.Yogyakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Salemba Empat. Jakarta.
- Said, E.Gumbira dan A.H. Intan. 2001. *Manajemen Agribisnis*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Siamat, D. 1999. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Kedua. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Singarimbun, M. dan S. Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Siregar, Sofian. 2015. *Statistika Terapan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta. Kencana.
- Soekartawi, 2001, *Agribisnis* (Teori dan Aplikasinya). Rajawali. Jakarta.
- Soetomo, G, 1997, *Kekalahan Manusia Petani* (Dimensi Manusia dalam Pembangunan Pertanian), Penerbit Kanisius, Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi). Alfabeta. Bandung
- Wolf, R, 1985, *Petani Suatu Tinjauan Antrpologis*, Rajawali, Jakarta.
- Yunus, Muhammad. 2007. *Bank Kaum Miskin* (Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan). Marjin Kiri. Depok.